

DAFTAR PUSTAKA

- ACFE. (2016, November 20). "Report to The Nations On Occupational Fraud and Abuse.". From ACFE: www.acfe.com
- Achmadi, A. M. (2002). *Good Governance dan Penguatan Instistusi Daerah, Masyarakat Transparansi Indonesia*. Jakarta.
- Achmadi, d. (2002). *Good governance dan Penguatan Institusi Daerah, Masyarakat Transparansi Indonesia*. Jakarta.
- Amalia, N. F. (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada DPRD Kabupaten Purworejo). <http://lib.unnes.ac.id/>.
- Amelia A, L. D. (2018). Pengaruh Pengetahuan Tentang Anggaran, Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik, Dan Akuntabilitas Publik Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Wilayah Sulawesi Utara. *ejournal.unsrat.ac.id*.
- Amertadewi, T. I. (2013). Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Majerial dengan Gaya Kepemimpinan dan Locus of Control Sebagai Variabel Moderasi. *E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 550.
- Aminudin. (2015). Fungsi Pengawasan Dprd Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. <http://jurnal.untad.ac.id/>.
- Amrizal, A. M. (2004). Pencegahan dan Pendeteksi Kecurangan oleh Internal Auditor. <http://www.bpkp.go.id/>.
- Anthony, R. N. (2005). *Sistem Pengendalian Manajemen. Terjemahan Kurniawan Tjakrawala*. Salemba Empat.
- Arvitaningrum, R., & Taman, A. (2019). Pengaruh Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran Dan Persepsi Anggota Dewan Tentang Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengawasan Apbd Di Kabupaten Klaten. *Jurnal Nominal vol.VIII no 2*.
- Asshiddiqie, J. (2006). Pengembangan dan Penegakan Hukum di Indonesia. *Seminar Menyoal Moral Penegakan Hukum dalam Rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada*.
- Astriningati. (2006). Pengaruh Komitmen Organisasi Dan Ketidakpastian Lingkungan Terhadap Hubungan Antara Partisipasi Anggaran Dengan Senjangan Anggaran (Studi Kasus Pada Perguruan Tinggi Swasta Di Daerah Istimewa Yogyakarta). <https://dspace.uui.ac.id/>.

- Astuty, E., & Fanida, E. H. (2013). Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) (Studi Pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 Di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun). <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/>.
- Azis, N. (2011). Partisipasi Merupakan Suatu Proses Pengambilan Keputusan Bersama Oleh Dua Bagian Atau Lebih Pihak Dimana Keputusan Tersebut Akan Memiliki Dampak Dimasa Depan Terhadap Mereka Yang Membuatnya. *Analisis Manajemen 5 No.1*.
- Bryant, W. a. (1982). *Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Liberty.
- Cantika, Y. (2018). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Kabupaten Polewali Mandar. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/>.
- Chandra, D. P. (2015). Determinan Terjadinya Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Fraud) Pada Dinas Pemerintah Kabupaten Grobogan. <https://docplayer.info/>.
- Coryanata, I. (2012). Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Pemoderasi Hubungan Pengentahuan Dewan Tentang Anggaran Dan Pengawasan Keuangan Daerah. *Fakultas Ekonomi Universitas Bengkulu*, 12(2):110–25.
- Coryanata, I. (2012). Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Pemoderasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dan Pengawasan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Investasi Vol. 12 No. 2,*, 110-125.
- Cressey, D. (1973). *Other People's Money*.
- Denis, D. (2001). Twenty Five Years of Corporate Governance Research and Counting. *Review of Financial Economics 10(3)*, 191.
- Determinasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dengan Pengawasan Dewan pada Keuangan Daerah (APBD) (Studi Empiris Pada DPRD Kota/Kabupaten dan, (2011). <http://eprints.undip.ac.id/>.
- Echyfan. (2018). Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Dan Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Pencegahan Kecurangan. *Skripsi Akuntansi Universitas Pasundan Bandung*.
- Eldayanti, N. K., & Wayan, N. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Integritas Dan Akuntabilitas Terhadap Pencegahanl Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Hita Akuntansi dan Keuangan Edisi Juli 2020*, 480.
- Elfi, R. (2013). Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Senjangan Anggaran

Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating. *ejournal.unp.ac.id*.

Fibrianti, D. d. (2013). Partisipasi Merupakan Suatu Proses Pengambilan Keputusan Bersama Oleh Dua Bagian Atau Lebih Pihak Dimana Keputusan Tersebut Akan Memiliki Dampak Dimasa Depan Terhadap Mereka Yang Membuatnya. *Junal Ilmu dan Riset Akuntansi 1 No.1*.

Fitrawansyah. (2014). *Fraud and Auditing*. Fitriani, siti.

Fitriani, S. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan (Fraud) Di Sektor Pemerintahan Berdasarkan Teori Fraud Triangle: Persepsi Pegawai Pemerintah (Studi Pada Skpd Di Kabupaten Jember). *Repository Universitas Jember*.

Fred, L. (2006). *Perilaku Organisasi*. Yogyakarta: Alih Bahasa V. A Yuwono.

Gandara, F. S. (2017). Pengambilan Keputusan Keuangan Dengan Pendekatan Analisis Rasio Keuangan Pada RSUD Ciawi Kabupaten Bogor. *Jurnal Akunida*.

Ghazali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Gohora, J., Lengkong, F. D., & Plagiten, N. N. (2018). Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Daerah Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, vol 4, Hal 1-9.

Gray, A. a. (1993). Codes of Accountability in the New Public Sector. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 52-67.

Hanny, C. M. (2016). Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Melalui Kepuasan Kerja, Komitmen Tujuan Anggaran, Job Relevant Information. <http://jia.stialanbandung.ac.id/>.

Helmi, N. (2016). Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Umpan Balik Anggaran Terhadap Kinerja Majerial. <http://repository.uin.ac.id>.

Indriantoro, N. d. (2013). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFEE.

Islam, E. S. (2018). Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Dan Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Pencegahan Kecurangan (Survey pada SKPD di Pemerintah Kota Bandung). <http://repository.unpas.ac.id/>.

Jensen, M. C., & W. Meckling. (1976). "Theory of the firm: Managerial behavior, agency cost and ownership structure". *Journal of Finance Economic download* dari <http://www.nhh.no/for/courses/spring/eco420/jensenmeckling-76.pdf>.

- Karyono. (2013). *Forensic Fraud*. Yogyakarta: CV. Andi.
- Kasenda, J. R., Poih, N. R., & Egeteen, M. (2020). Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Kota Manado. *Development Resoures Management Review Vol 1 No 1*.
- Kholmi, M. (2010). Akuntabilitas Dalam Perspektif Teori Agensi.” *Ekonomika Bisnis* 02(02):357–70.*Ekonomika Bisnis* 02(02)
- Krina P., L. L. (2003). “*Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi*” . Jakarta: Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Kristianto, A. (2020, November 10). *Dianggap Tertutup, Truth Laporkan Walikota Tangsel Soal Anggaran Covid*. From Zona Banten: <https://zonabanten.pikiran-rakyat.com/banten/pr-23938942/dianggap-tertutup-truth-laporkan-walikota-tangsel-soal-anggaran-covid>
- Kuncoro, M. (2009). “*Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi*.”. Jakarta: Erlangga.
- Lestari, E. A. (2014). Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat Dan • Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (• APBD) Di Dprd Kota Bandung. *repository.widyatama.ac.id*.
- Lezimat, L. R. (2018). Pengaruh Penerepan E-Procurement Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang Dan Jasa (Survey Pada Pemerintah Daerah Di Wilayah Bandung Raya). *http://repository.unpas.ac.id/*.
- Malayu, H. (2002). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Maya Triana, Y. d. (2012). Pengaruh Partisipasi Anggaran, Budget Emphasis, dan Locus Of Control Terhadap Slack Anggaran (Survei pada Hotel Berbintang Di Kota Jambi). *https://www.researchgate.net/*.
- Melisa Eka Sari, F. I. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Kesesuaian Kompensasi Dan Pengendalian Intern Terhadap Potensi Kecurangan Dana Desa. *urnal Eksplorasi Akuntansi Vol. 1, No 3, Seri E, 1443- 1457*.
- Mendi, I. P., & Suparsto, H. B. (2019). Pengaruh Partisipasi Penganggaran Pada Senjangan Anggaran Dengan Gaya Kepemimpinan Dan Karakter Personal Sebagai Variabel Pemoderasi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali , Indonesi. *E-Jurnal Akuntansi, 28:1230–62*.
- Mendi, S. A., & Suparto, H. B. (2019). Pengaruh Partisipasi Penganggaran Pada Senjangan Anggaran Dengan Gaya Kepemimpinan Dan Karakter Personal Sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi Vol.28.2.Agustus (2019): 1230-1262*.

- Miftahurrohmah, K. (2018). Tugas dan Fungsi Anggota DPRD dalam Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan. *Repository Institusi USU*.
- Mikkelsen, B. (1999). *Metode Penelitian Partisipatoris Dan Upaya-Upaya Pemberdayaan: Sebuah Buku Pegangan Bagi Para Praktisi Lapangan*. Jakarta: Yayasan obor indonesia.
- Mustika Yasa, D. A. (2017). Pengaruh Partisipasi Anggaran, Penekanan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Dan Self Esteem Terhadap Senjangan Anggaran Desa Di Kecamatan Kubutambahan. *e- Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*.
- Parjiyono, Y. (2019, maret 21). *Hanya Lahirkan Dua Perda, Pengamat Sebut Ada Korupsi Anggaran Di DPRD Tangsel*. From <https://www.suarakarya.id>: (<https://www.suarakarya.id/detail/88735/Hanya-Lahirkan-Dua-Perda-Pengamat-Sebut-Ada-Korupsi-Anggaran-Di-DPRD-Tangsel>).
- Philipus M. Hadjon, R. S. (2008). Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia. *Gadjah Mada University Press*, hal 127.
- Pristiyanti, I. R. (2013). Persepsi Pegawai Instansi Pemerintah Mengenai Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fraud Di Sektor Pemerintah. *Accounting Analysis Journal*.
- Putra, M. Y. (2016). Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Di Pemerintah Daerah. <https://docplayer.info/>. Raba, D. H. (2006). "Akuntabilitas: konsep dan Implementasi". Malang: UMM Press.
- Rahmawati, E. (2013). Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Senjangan Anggaran Dengan Asimetri Informasi Dan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kota Padang). <http://ejournal.unp.ac.id/>, 12-14.
- Rika, A. (2019). Pengaruh transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat pada Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang. <http://eprints.walisongo.ac.id/>.
- Rosnaena. (2015). Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Dan Job Relevant Information Sebagai Variabel Moderating. <http://repository.uin-alauddin.ac.id/>.
- Rukminto, I. (2017). *Perencanaan partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: Dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Jakarta: Fisip Universitas Indonesia Press H27.

- Sahetapy, J. (2013). *Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Santoso, S. (2015). *SPSS 20 Pengelolaan Data Statistika Di Era Informasi*. Jakarta: PT. Alex Media Komputindo, Kelompok Gramedia.
- Santoso, S. (2015). *SPSS 20 Pengolahan Data Statistik Di Era Informasi*. Jakarta: PT. Alex Media Komputindo, Kelompok Gramedia.
- Saputra, K. A. (2019). Praktek Akuntabilitas Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia untuk Penegahaan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi; Vol. 10, No. 2*, 174.
- Sawyer, L. B. (2006). *Saywe's Internal Auditing*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sembiring, B. (2013). “ Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Berbasis Kinerja”. *Tesis Universitas Sumatera Utara*.
- Siregar, S. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS*. Jakarta: Kencana.
- Solikhun, A. R. (2012). Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah: Komitmen Organisasi dan Budaya Organisas. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 1(2):1- 11.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.
- Sulisiana, M. N. (2014). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Penelitian pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bandung). *repository.upi.edu*
- Sulistiyani, A. T. (2011). *Memahami Good Governance: Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sulistoni, G. (2003). “*Fiqh Korupsi: Amanah vs Kekuasaan*”. Nusa Tenggara Barat: Somasi.
- Sunarto. (2004). 'Sistem Politik Indonesia'. *Paparan Kuliah. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang*.
- Taman, R. A. (2019). Pengaruh Pengetahuan Anggota Dewan tentang Anggaran dan Persepsi Anggota Dewan tentang Partisipasi Masyarakat terhadap Pengawasan APBD di Kabupaten Klaten. *Jurnal Nominal Vol VIII NO.2*, 234-235.
- Tomo, H. (2011). Determinasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dengan Pengawasan Dewan pada Keuangan Daerah (APBD). <http://eprints.ums.ac.id/>.

Trisnainingsih, S. (2007). Independensi Auditor Dan Komitmen Organisasi Sebagai Mediasi Pengaruh Pemahaman Good Governance, Gaya Kepemimpinan Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Auditor. *Simposium Nasional Akuntansi X Makasar*.

Umar, J. d. (2016). Model Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintah Daerah di Kabupaten Senjai. *Ad'ministrare*.

Usmaniya, D. (2013). Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Program Pelaksanaan Kelompok Usaha Bersama(Kube) Di Kelurahan Dompok Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjung Pinang . <http://jurnal.umrah.ac.id/>.

Utami, K. (2015). Determinasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Dewan Pada Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada DPRD Kabupaten Sragen). <http://eprints.ums.ac.id/>.

Wahyuni, D. N. (2017). Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Perda Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Berau. *repositori.uin*.

Waluyo. (2007). *Manajemen publik : (konsep, aplikasi dan implementasinya dalam pelaksanaan otonomi daerah)*. Bandung: Mandar Maju.

Wigun,A. (2016).Landasan Teori dan Konsep Pengawasan. (PDF 2011, elib.unikom.ac.id/files/disk1/683/jbptunikompp-gdl-anjaswigun-34101-9-unikom_a-i.pdf, Skripsi), 21.

Zulkarnain, R. M. (2013). Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Fraud Di Sektor Pemerintahan (Studi Kasus Pada Dinas Se-Kota Surakarta). <http://lib.unnes.ac.id>.

